

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah. (2021). *Pendapatan Asli Daerah Per Rekening*. Bapenda.
https://sikopat.kebumenkab.go.id/index.php/public/index/per_rekening
- Badan Pusat Statistik. (2021a). *Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Kebumen 2021*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Kebumen.
- Badan Pusat Statistik. (2021b). *Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah*. <https://jateng.bps.go.id/indicator/17/1006/1/jumlah-kendaraan-bermotor-menurut-kabupaten-kota-dan-jenis-kendaraan-di-provinsi-jawa-tengah.html>
- Budiman, F., Kismartini, & Herawati, A. R. (2021). “New Sakpole” Sebuah Alternatif Kebijakan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Era Pandemi Covid-19. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 22(1), 19–25.
- Dwiyanto, A. (2017). *Manajemen Pelayanan Publik* (Kedua). Gajah Mada University Press.
- Handaka, R. D. (2017). *Buku I Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Politeknik Keuangan Negara STAN.
- Karina, N., & Budiarmo, N. (2016). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Gorontalo. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 4(1), 715–722.
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (2003).

- Kusumawati, L., & Wiksuana, I. G. B. (2018). Pengaruh Pendapatan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 7(5).
<https://doi.org/10.24843/ejmunud.2018.v07.i05.p12>
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan* (Revisi 201). Penerbit Andi.
- Maryam, N. S. (2016). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. *Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi*, VI(1), 1–18.
- Mulyawan, A., & Novia, D. (2016). Aplikasi Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Online Berbasis Web (Studi Kasus Di Samsat Soreang Kab. Bandung). *Jurnal Computech & Bisnis*, 10(1), 30–39.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen. (2015). *Geografis*.
<https://www.kebumenkab.go.id/index.php/web/page/23>
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah, 1 (2011).
- Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah, (2018).
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, *Jurnal Media Hukum* 184 (2019).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Publik, (2012).
- Prabandaru, A. (2018). *Perbedaan Pajak Pusat dan Daerah yang Wajib Anda Ketahui*. Klik Pajak. <https://klikpajak.id/blog/pajak-pusat-dan-daerah/>

- Rachdianti, F. T., Astuti, E. S., & Susilo, H. (2016). *Pengaruh Penggunaan E-tax Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. 11(1), 1–7.
- Riduansyah, M. (2003). *Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah*. 7(2), 49–57.
- Rizal, A. S. (2019). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang*, 7(1). <https://doi.org/10.32493/jiaup.v7i1.2204>
- Sutrisno, E. (2007). *Budaya Organisasi* (Pertama). Prenada Media Group.
- Ulum, M. (2017). *Jateng Luncurkan Aplikasi E-Samsat Sakpole*. Bisnis.Com. <https://semarang.bisnis.com/read/20170717/536/767924/jateng-luncurkan-aplikasi-e-samsat-sakpole>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No. 11 Tahun 2008 (2008).
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, (2009).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, 67 14 (2007).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 2 255 (2009).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, 2004 CWL Publishing Enterprises, Inc., Madison 352 (2004).
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, 101 55 (2004).

UPPD Kabupaten Kebumen. (2021a). *Jumlah dan Objek PKB Melalui New SAKPOLE*.

UPPD Kabupaten Kebumen. (2021b). *Jumlah Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Kebumen*.

UPPD Kabupaten Kebumen. (2021c). *Target dan Realisasi PKB di Kabupaten Kebumen*.

Usmani, L. F., & Rahman, A. Z. (n.d.). *Survei Kualitas Layanan Aplikasi Sistem Administrasi Kendaraan PAjak Online (SAKPOLE) Jawa Tengah di Kota Semarang*.

Wahyudi, H. S., & Sukmasari, M. P. (2018). Teknologi Dan Kehidupan Masyarakat. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 3(1).